

Lahan Relokasi Pascabencana Masih Jadi Soal

Faktor kerabat dan kedekatan dengan lokasi mencari nafkah jadi sorotan penyintas. Di sisi lain, ada risiko keberulangan bencana.

KALIANDA, KOMPAS — Penanganan pascabencana tsunami di Lampung, Pandeglang, dan Palu belum sepenuhnya tuntas. Para penyintas bencana masih berkebutakan pada persoalan lahan relokasi hunian sementara dan hunian tetap yang belum sesuai harapan.

Para pengungsi korban tsunami Selat Sunda di Kabupaten Lampung Selatan, Lampung, misalnya, berharap hunian sementara yang dibangun pemerintah memenuhi standar sanitasi dan air bersih yang baik. Warga juga berharap lokasi hunian berada dekat sumber nafkah mereka.

Hal itu dikemukakan sejumlah pengungsi di Desa Kunjir dan Way Muli Timur, Kecamatan Rajabasa, Lampung Selatan, Kamis (17/1/2019). Warga yang sebagian besar petani dan nelayan berharap direlokasi tidak jauh dari lahan garapan dan tempat tinggal mereka.

Jafar (56), nelayan lebih dari 30 tahun, mengatakan, dirinya enggan jika dipindah jauh dari kawasan pesisir. "Selama ini, saya mencari nafkah dari laut. Saya tidak punya keterampilan lain," ujar Jafar.

Sarmin (39), pengungsi lainnya, mengatakan, ia khawatir tidak dapat menggarap lahan pertaniannya jika hunian sementara (huntara) jauh dari desa. Padahal, ia hidup menggarap sawah dan kebun pisang.

Hingga minggu keempat pascatsunami, Sarmin dan warga lainnya belum bisa be-

kerja normal. Peralatan kerja mereka rusak dan hancur.

Camat Rajabasa Sabtudin mengatakan, ada sekitar 300 perahu nelayan rusak. Pihaknya telah mendata nelayan agar segera dapat bantuan.

Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Lampung Selatan I Ketut Sukerta menjelaskan, pemerintah memprioritaskan pembangunan hunian bagi para pengungsi setelah masa tanggap darurat berakhir 19 Januari 2019. Sebagian lahan telah disiapkan.

Di Palu, Sulawesi Tengah, status dua lahan relokasi dari usulan penyintas likuefaksi menjadi kendala direalisasikan karena lahan milik perorangan. Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah perlu melobi pemerintah pusat untuk alokasi ganti rugi atau mekanisme tukar guling lahan itu dengan lahan negara.

"Sudah seharusnya gubernur mengusulkan anggaran kepada pemerintah pusat kalau memang belum dialokasikan. Sepanjang dikomunikasikan dengan baik, saya kira masalah ini bisa diselesaikan," kata anggota Panitia Khusus Pengawasan Penyelenggaraan Pascabencana DPRD Sulteng, Moh Masykur.

Ia menanggapi pernyataan Gubernur Sulteng Longki Djanggola yang menyebut ada potensi masalah terkait status lahan dua titik relokasi baru yang diusulkan penyintas di Kelurahan Petobo dan Kelurahan Balaroa, Kota Palu. La-

han itu milik perorangan.

Nurhasan (45), penyintas likuefaksi Petobo, menyatakan, para penyintas tak mau direlokasi jauh dari kerabat. Jarak lahan relokasi yang ditetapkan pemerintah dari Petobo sekitar 7 kilometer.

Keberulangan bencana

Instruksi Presiden Nomor 10 Tahun 2018 mengamanatkan pemulihan kembali daerah bencana di Sulawesi Tengah harus selesai dua tahun. Meski begitu, pembangunan kembali kawasan itu harus memperhitungkan potensi keberulangan bencana dan efisiensi anggaran.

"Periode ulang tsunami di Teluk Palu dan Selat Makassar termasuk paling tinggi di Indonesia. Ini harus jadi pertimbangan penting dalam pembangunan kembali kawasan ini," kata Ketua Ikatan Ahli Tsunami Indonesia Gegar Prasetya.

Asisten Deputi Lingkungan dan Mitigasi Bencana Maritim Kemenko Kemaritiman Sahat Mananor Panggabean mengatakan telah mengingatkan instansi terkait untuk memperhitungkan risiko bencana ke depan. "Ketika sudah dibangun hunian tetap, lokasinya harus aman dari bencana, terutama likuefaksi," ujarnya.

Berdasarkan data Badan Nasional Penanggulangan Bencana, untuk memulihkan Sulteng dan NTB dibutuhkan dana Rp 34 triliun. Untuk Sulteng saja Rp 22 triliun.

(VIO/VDL/BAY/AIK)